



Kurangi Aktivitas di Luar Rumah

Mangayubagya Tingalan Jumenengan Dalem di Malioboro Ditunda

JOGJA, Radar Jogja - Menyikapi wabah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pemprov DIJ mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko penularan pada individu. Sejumlah kegiatan publik, termasuk Mangayubagya Tingalan Jumenengan Dalem yang bakal digelar Selasa Wage mendatang pun ditunda. ▶ *Baca Kurangi... Hal 7*



JUMPA PERS: Gubernur Hamengku Buwono X saat menyampaikan pembentukan Tim Gugus Tugas Siaga Korona di Kompleks Kepatihan, kemarin (16/3)

Yang tidak punya kepentingan mendesak bisa tinggal di rumah. Mungkin selama dua minggu cukup untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kami juga mengurangi aktivitas di luar rumah yang memungkinkan untuk ditunda."

Hamengku Buwono X

Gubernur DIJ

Sambungan dari hal 1

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, pengurangan aktivitas di luar rumah ini juga berlaku pada aktivitas kelembagaan guna menghindari berkumpulnya kelompok masyarakat. "Yang tidak punya kepentingan mendesak bisa tinggal di rumah. Mungkin selama dua minggu cukup untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kami juga mengurangi aktivitas di luar rumah yang memungkinkan untuk ditunda," katanya kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, kemarin (16/3).

HB X yang juga raja Keraton Jogja ini juga membatalkan acara di mana masyarakat ingin merayakan ulang tahun kenaikan takhta Sultan HB X dalam perayaan Jumene-nan Dalam saat Selasa Wage di Malioboro. "Saya *approach* pa-

nitia, bisa tidak acara Selasa Wage ditunda. Jadi sepi tidak ada aktivitas budaya," paparnya.

Ia menginginkan kegiatan perayaan bisa berganti konsep dengan prinsip melibatkan masyarakat dalam pencegahan Covid-19. Misalnya melalui kegiatan bersih-bersih kampung, penyemprotan disinfektan, hingga penyuluhan pada masyarakat guna mengurangi potensi penularan penyakit. "Yang penting adalah masyarakat ikut memiliki peran, tidak sekadar jadi objek. Taunya hanya diperintah," jelasnya.

HB X juga mengimbau kepada restoran, rumah makan, hingga tempat hiburan untuk menyediakan fasilitas seperti *thermal gun* untuk memeriksa pengunjung yang masuk. Berikut dengan sabun dan *hand sanitizer*. "Untuk mengecek pengunjung yang datang agar

bisa diperiksa untuk mengetahui dia tetap hijau (suhu tidak lebih dari 37 derajat)," tegasnya.

Hingga saat ini, gubernur sedang mengupayakan pembentukan Tim Gugus Tugas Slaga Korona sejak satu pasien di DIJ diumumkan positif korona. Dalam organisasi itu sejumlah kelembagaan bakal dilibatkan. Tim yang dibentuk tak hanya menaungi bidang kesehatan, melainkan juga ekonomi, sosial, dan budaya. "Kemarin (15/3) sudah berkumpul dengan Pemprov, sekarang (16/3) dengan polisi dan TNI. Kira-kira 2-3 hari struktur organisasi kebijakan bisa diselesaikan," paparnya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengatakan, BPBD tengah mengaktivasi posko terpadu pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Upaya pencegahan jadi tantangan jangan sampai (penula-ran) menjadi masif. Upaya pencegahan akan dilakukan gerakan masal yang melibatkan semua sektor dari provinsi hingga kabupaten/kota," katanya.

Untuk mempersiapkan personel dalam upaya penanganan pandemi, petugas telah melakukan simulasi dekontaminasi alat di posko pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di posko terpadu yang terletak di halaman BPBD DIJ, kemarin (16/3).

Pemprov DIJ Siap Tanggung Biaya ODP

Pemprov DIJ berkomitmen untuk menanggung pembiayaan individu yang melakukan pemeriksaan terkait Covid-19. Namun masyarakat diimbau untuk tidak panik dan berbondong-bondong melakukan pemeriksaan. Sebab,

penanggung pembiayaan khusus untuk individu berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

ODP adalah individu yang pernah melakukan kontak dengan wilayah yang terjangkit Covid-19. Apabila ODP mengalami simtom atau gejala penyakit Covid-19, statusnya bakal dinaikkan menjadi pasien dalam pengawasan (PDP). Bila PDP terkonfirmasi melakukan kontak dengan orang positif korona, maka statusnya meningkat menjadi *suspect* untuk dilakukan pemeriksaan spesimen.

"Kalau masyarakat hanya batuk pilek terus minta periksa korona, tidak bisa dilakukan," jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DIJ Pembajun Setyaningastuti.

Selain itu, penentuan hasil pemeriksaan hanya dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengem-

banan Kesehatan (Balitbangkes) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) yang sudah diberi wewenang. "Sebab primer dan *reagen* (untuk tes spesimen) hanya dimiliki Litbangkes dan BBTKLPP yang ditunjuk. Karena kalau tidak terstandar, hasilnya berbeda antara satu lab dan lainnya," paparnya.

Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan ODP menjadi PDP adalah faktor komorbid atau penyakit bawaan pada pasien. Sebab saat dirawat, terkadang pasien juga memiliki komorbid seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain. "Tapi sebenarnya gejala batuk pilek tidak menyebabkan dia harus dirawat. Melainkan (dirawat) gara-gara komorbidnya," paparnya.

Bila ada faktor komorbid, umumnya biaya perawatan dan pemeriksaan bisa ditanggung BPJS. Oleh sebab itu, Dinkes perlu membuat petunjuk teknis khusus untuk menentukan pasien yang bisa didanai dan tidak.

"Dinkes DIJ juga tengah menyusun juknis supaya ada pedoman yang disusun dari RS dan organisasi profesi," katanya.

Dia mengimbau pada masyarakat untuk tidak perlu berbondong-bondong melakukan pemeriksaan diri. Masyarakat harus bisa menengarai dirinya sendiri. "Kalau ada batuk pilek dan sesak napas, ada suhu tinggi, ada kontak dengan orang dan wilayah terjangkit. Tapi kalau tidak ada satu pun kriteria, tidak usah periksa. Cukup jaga diri biar sehat," jelasnya. (tor/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005